

Fikrah Nahdliyah Dalam Membentuk Moral Bangsa; Studi Empiris**Di PWNu Jawa Timur****Ahmad Baihaqi Husnan****ahmadbaihaqihusnan@gmail.com****Institut Kariman Wirayudha****Abdul Haris Rasyidi****abdulharisrasyidi30@gmail.com****STIT Palapa Nusantara****ABSTRACT**

NU adopts Ahlussunah wal Jama'ah, a mindset that takes the middle path between the extremes aqli (rationalist) with the extreme naqli (scripturalist). Therefore, to reinforce identity, it was decided a framework for the Nahdliyyen which later became known as "Fikrah Nahdliyah". The issues raised in this study were: (1). How Fikrah Nahdliyah role in the process of moral formation PWNu nation in East Java? (2). What are the features of Fikrah Nahdliyah capable of forming moral PWNu nation in East Java? (3). What factors inhibiting and supporting Fikrah Nahdliyah in shaping moral PWNu nation in East Java?

Answering these problems the author using qualitative methods, using the technique of collecting data through observation, interview. Analisis technique use is data reduction, data presentation, verification and conclusion. Research Nahdlatul Ulama have a significant role in shaping the nation's morale, as evidenced by the existence of boarding schools and other institutions are autonomous body of the organization Nahdlatul Ulama. Results are in reform and social criticism, NU has its own perspective and methodology known as Fikrah Nahdliyah, which is a cornerstone of thinking for NU members are adhering to the principle of moderate (fikrah tawasuthiyyah), tolerans (fikrah tasamuhiyyah), reform (fikrah ishlahiyyah), dynamic (fikrah tathawwuriyyah) and methodological (fikrah manhajiyyah). But in society Fikrah Nahdliyah uneven implementation, as a result many of the residents of East Java who lost organizational identity, is recognized by the Regional Board of Nahdlatul Ulama, which are caused lack of socialization of the board area, branches and twigs to the public about Fikrah Nahdliyah. As for the factors inhibiting and supporting Fikrah Nahdliyah is, inhibiting television shows that less educate the public, destruction of brotherhood, practical politics and so forth. As supporters, including the actualization of values Aswaja, actualization khittah Nahdlatul Ulama, build brotherhood, community pioneers and others.

Keywords: *Fikrah Nahdliyah and Moral.*

ABSTRAK

Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunah wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (*rasionalis*) dengan kaum ekstrim naqli (*skripturalis*). Karena itu, untuk mempertegas keidentitasannya, maka perlu sebuah kerangka berpikir di kalangan Nahdliyyien yang kemudian dikenal dengan sebutan "**Fikrah Nahdliyah**". Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Fikrah Nahdliyah dalam proses pembentukan moral bangsa di PWNu Jawa Timur. Selanjutnya, mengetahui dan memahami ciri-ciri yang dikembangkan Fikrah Nahdliyah dalam membentuk moral bangsa di PWNu Jawa Timur. Dan Mengetahui faktor penghambat dan pendukung Fikrah Nahdliyah dalam membentuk moral bangsa di PWNu Jawa Timur. Untuk mampu menganalisis dan menjawab beberapa masalah tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara (*interview*). Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Nahdlatul Ulama memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk moral bangsa, terbukti dengan adanya pondok pesantren dan lembaga-

lembaga lain yang termasuk badan otonom dari organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam melakukan pembaharuan dan kritik sosial, NU memiliki cara pandang dan metodologi tersendiri yang dikenal dengan Fikrah Nahdliyah, yaitu suatu landasan berfikir bagi warga Nahdlatul Ulama yang mengacu kepada prinsip moderat, (*Fikrah Tawassuthiyyah*) tolerans, (*Tasammuhiyyah*) reformasi, (*Fikrah Ishlahiyyah*) dinamis, (*Fikrah Tathawwuriyyah*) dan metodologis, (*Fikrah Manhajiyyah*). Namun di masyarakat implementasi Fikrah Nahdliyah kurang merata, akibatnya banyak diantara warga masyarakat Jawa Timur yang kehilangan identitas keorganisasiannya, ini diakui oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, diantaranya disebabkan kurang adanya sosialisasi dari pengurus wilayah, cabang maupun ranting kepada masyarakat tentang Fikrah Nahdliyah. Adapun faktor penghambat dan pendukung Fikrah Nahdliyah adalah. Penghambatnya, tayangan televisi yang kurang mendidik kepada masyarakat, rusaknya persaudaraan, politik praktis dan lain sebagainya. Adapun pendukungnya, diantaranya adalah aktualisasi nilai-nilai *aswaja*, dan aktualisasi khittah Nahdlatul Ulama.

Kata kunci: Fikrah Nahdliyah, moral,

PENDAHULUAN

Kehadiran NU sebagai organisasi keagamaan sekaligus organisasi kemasyarakatan terbesar dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, mempunyai makna penting dalam menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. NU lahir dan berkembang dengan corak dan budayanya sendiri. Sebagai organisasi keagamaan Ahlu as Sunnah Wal Jama'ah, maka NU menampilkan sikap akomodatif terhadap berbagai madzhab keagamaan yang ada disekitarnya. NU tidak pernah berfikir untuk menyatukan apalagi menghilangkan madzhab-madzhab keagamaan yang ada. Dan sebagai organisasi kemasyarakatan, NU menampilkan sikap toleransi terhadap nilai-nilai lokal. NU berkulturasi dan berinteraksi positif dengan tradisi dan budaya masyarakat lokal. Sehingga secara praktik organisasi, Nahdlatul Ulama memiliki wawasan multikultural dalam arti kebijakan sosialnya, bukan melindungi tradisi atau budaya setempat, tetapi mengakui manifestasi tradisi dan budaya setempat yang memiliki hak hidup di Republik tercinta ini.

Dalam melakukan pembaharuan dan kritik sosial, NU memiliki cara pandang dan metodologi tersendiri yang dikenal dengan Fikrah Nahdliyah. Fikrah Nahdliyah yaitu suatu landasan berfikir bagi warga NU yang mengacu kepada prinsip moderat (*fikrah tawasuthiyyah*), tolerans (*fikrah tasamuhiyyah*), reformasi (*fikrah ishlahiyyah*),

dinamis (*fikrah tathawwuriyyah*) dan metodologis (*fikrah manhajiyyah*). Konsepsi ini menjadi ciri khas warga NU dalam mengukur dan menyelesaikan setiap persoalan. Idealnya konsepsi ini ditingkatkan menjadi konsepsi kebangsaan (*fikrah wathaniyyah*), kalau perlu menjadi konsepsi global (*fikrah 'alamiyyah*). NU berkeyakinan bahwa jika fikrah-fikrah ini dapat diimplementasikan di tanah air, maka tidak tertutup kemungkinan pusat peradaban dunia Islam masa depan akan bergeser ke Indonesia. (Mahfudz, 2010: 14).

Agama merupakan faktor yang sangat penting untuk mengangkat moral bangsa. Islam tidak hanya membatasi diri pada pendidikan individu, agar hanya individu saja yang mempunyai moralitas. Tapi ajaran Islam mencakup semua umat. Kemudian ia memerintahkan agar umat bersatu, karena persatuan merupakan asas kekuatan.

Moral adalah kekuatan tersembunyi dalam diri manusia, yang dapat mendorongnya bekerja secara aktif dan terus menerus berpikir dengan penuh keberanian dan semangat, meskipun faktor yang melatar belakangnya berbeda. Bila ingin menyederhanakan definisi ini, dapat kami katakan, bahwa setiap individu di dalam suatu bangsa harus tampil sebagai pemberani dan tidak penakut, kuat dan tidak lemah, memiliki kemuliaan dan tidak hina, maju terus tanpa mengenal mundur, sabar dan tidak goyah,

optimis dan tidak pesimis, siap berkorban dengan harta jiwanya demi tercapainya tujuan yang mulia. (Khatthab, 1992: 16).

Nahdlatul Ulama memiliki konsep yang cukup bagus, bahkan sangat bagus dalam menerapkan kemajuan dan perkembangan anak bangsa khususnya dalam lingkup moral, namun realitanya saat ini kebanyakan anak bangsa, tidak memperhatikan konsep yang ada. Di sini mulai muncul paradoks, di satu sisi Nahdlatul Ulama, setidaknya ditingkat pusat selalu menjaga untuk tetap berada dalam pijakan Fikrah Nahdliyah, namun di sisi lain Nahdlatul Ulama terutama di daerah-daerah, malah seringkali berada di luar lintasan fikrah tersebut. Beragam aktivitas, keputusan dan pemikiran yang dimunculkan oleh Nahdliyin di daerah-daerah cenderung lebih berpihak pada semangat untuk mengusung tema formalisasi syariat Islam. Mereka nampaknya lebih menyukai bahkan lebih merasa nyaman untuk bersetubuh dengan wacana-wacana yang banyak diusung oleh kempok-kelompok Islam ekstrimis apalagi kalau sudah masuk dalam zona amar ma'rif nahin dan munkar.

Kenyataan ini sebagaimana pernah diungkap oleh K.H Hasyim Muzadi (*NU Online*, 09/04/2007). Ia menyatakan bahwa mengembangkan Fikrah Nahdliyah atau pokok-pokok pemikiran ke-NU-an mengalami banyak kendala. Saat ini, Fikrah Nahdliyah sedang berada dalam "kepungan" berbagai macam ideologi dan pemikiran lain. Hal ini disebabkan karena Fikrah Nahdliyah yang menjadi ciri khas pemikiran Nahdlatul Ulama kurang disosialisasikan secara massif baik secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat Nahdliyin, akibatnya banyak yang tidak peduli dan tidak tahu tentang Nahdlatul Ulama, walaupun mereka lahir dan besar di lingkungan NU.

Rupanya, pernyataan ini bukan hanya isapan jempol belaka. Di Madura, misalnya,

daerah yang dikenal sebagai salahsatu basis Nahdlatul Ulama, karena mayoritas masyarakatnya merupakan Nahdliyin. Bahkan di Madura, NU telah dijadikan sebagai "agama" oleh sebagian besar masyarakat kalangan bawah yang terkenal sangat fanatik. Fenomena menguatnya semangat untuk lebih menyukai wacana-wacana formalisasi syariat Islam begitu mudah didapatkan, bahkan cenderung merata hampir disebagian Nahdliyin yang tersebar di empat kabupaten di pulau Madura. Fenomena penerapan Perda Syariat Islam di Pamekasan menjadi salahsatu fakta adanya kesenjangan pemahaman Fikrah Nahdliyah antara NU pusat, dengan di daerah. Perda yang lahir atas desakan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) yang dibentuk atas dukungan dari sejumlah Organisasi masyarakat (Ormas) Islam telah menempatkan Nahdlatul Ulama pamekasan sebagai pendukung utama. Kesenjangan dalam memposisikan Fikrah Nahdliyah ini juga terjadi di Kabupaten Sampang, tatkala meletusnya konflik Sunni-Syiah. Pemaknaan adanya *Fikrah Tasamuiyyah (pola pikir toleran)* dalam Fikrah Nahdliyah yang coba dipaparkan oleh PBNU malah kurang memunculkan respon positif dari kiai-kiai NU Sampang baik yang berada distruktural maupun non structural. (Mahatma, 2008: 61).

Fenomena yang serupa juga ditemukan di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep. Walaupun skalanya tidak se ekstrim seperti yang terjadi di Pamekasan dan Sampang namun gelagat untuk mengarah pada dukungan penerapan Islam formalistik sangat jelas untuk dibaca. Di Bangkalan, PCNU setempat mengusulkan diterbitkannya Perda agar seluruh peserta didik dan pegawai kantor, wajib menggunakan busana muslim atau berjilbab. Hal tersebut dinilai sangat penting, guna menjaga norma agama dan sekaligus menegaskan identitas kota

santri. Usulan tersebut, dituangkan secara langsung oleh jajaran PCNU, dalam hearing dengan DPRD setempat dan organisasi lain, yang membahas masalah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan pendidikan, di ruang DPRD Bangkalan (Detik, 29 Juli 2009). Lain lagi dengan gejala yang muncul di Sumenep, Meskipun menuai pro kontra, keinginan DPRD Sumenep untuk menjadikan Sumenep sebagai kawasan bebas buta huruf Al-Qur'an dengan adanya Perda khusus nampak sangat mendapatkan dukungan dari sejumlah aktivis NU. Terbukti Raperda Wajib Baca Tulis Al-Qur'an saat itu begitu mudah masuk dalam program legislasi daerah. Ditengarai penetapan perda ini akan dilanjutkan dengan penerapan perda syariat Islam di Sumenep. (Mahatma, 2008: 62).

Mencermati dan menganalisis semua ini, maka patut kiranya dilakukan kembali kajian-kajian yang lebih mendalam, serta evaluasi yang menyeluruh terhadap proses internalisasi dan implementasi Fikrah Nahdliyah ditubuh Nahdlatul Ulama terutama di daerah-daerah. Pergulatan internal inilah yang juga menjadi tantangan NU masa kini, di samping ancaman ideologi transnasional yang mulai tumbuh subur di kantong-kantong NU. Penulis yakin apa yang terjadi di Madura pada khususnya, juga ditemukan di daerah-daerah lain. Dengan demikian, secara sepihak dan spontan tidak bisa menyalahkan Nahdliyyin di daerah akibat ketidaktahuannya. Karena bisa jadi selama ini PWNU bahkan PBNU dan elit-elit NU lainnya masih cenderung elitis dalam memaknai dan menerapkan Fikrah Nahdliyah. Bangsa akan menjadi besar dan terhormat apabila memiliki moral yang tinggi dan budi yang luhur terhadap Tuhan, sesama manusia serta lingkungan sekitar.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menentukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian ini paling tidak mencakup beberapa hal diantaranya adalah penelitian kualitatif yang bertolak dari filsafat konstruktivisme dan berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran sosial yang diinterpretasikan oleh individu individu. (Sukmadinata, 2006: 94).

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode yang dimaksud adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat.¹ Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto "lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif". Pendekatan kualitatif adalah "Sebagai produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menurut mereka". (Arikunto, 1993: 209).

Untuk mengajukan pertanyaan kepada informan, peneliti terlebih dahulu harus memahami bahasa dan budaya informan. Memahami bahasa dan budaya informan ini sangatlah penting, agar peneliti dapat memahami makna perilaku, ungkapan, serta sikap yang ditunjukkan oleh informan. (Idrus, 2009: 105). Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama menjadi informan, karena sebagai atasan dari pengurus cabang maupun ranting, serta lebih besar pengaruhnya terhadap lembaga cabang dan ranting, dan lebih luas cakupannya.

HASIL DAN ANALISIS TEMUAN PENELITIAN

1. Fikrah Nahdliyah Dalam Pembentukan Moral Bangsa di PWNU Jawa Timur.

Diantara peran Fikrah Nahdliyah di PWNU Jawa Timur adalah, besarnya respon dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam berbagai hal yang terjadi di masyarakat Jawa Timur pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, terbukti dalam menangani berbagai aliran yang masuk di Jawa Timur, PWNU langsung melakukan konsolidasi penguatan akidah kepada jajaran pengurus cabang maupun ranting Jawa Timur, diadakannya pula Forum Kiyai Muda (FKM) Jawa Timuryang bertujuan untuk meluruskan dan mengkritisi berbagai pemikiran dalam tubuh NU sendiri yang dianggap melenceng serta tidak sesuai dengan Fikrah dan Khiththah Nahdlatul Ulama yang dirumuskan oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya *Qonun Asasi* dan *I'tiqod Ahlussunnah wal Jama'ah*. Diadakan pula kader penggerak NU di berbagai pondok pesantren di Jawa Timur, termasuk di pondok pesantren Darul Istiqomah di Batuan Sumenep Madura. Diadakannya pesantren studies, pemberdayaan masyarakat, Lakpesdam NU mengadakan FGD tentang kerukunan umat beragama, rapimda, pelatihan kepemimpinan, pengobatan gratis, serta silaturahmi PWNU ke PCNU di Jawa Timur. (Majalah AULA, 2014: 35).

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi, baru terbentuk sejak tahun 1926, namun sebagai komunitas (*budaya*) sudah ada jauh sebelum NU berdiri, belakangan baru diinstitusikan (*dilembagakan*) ada perbedaan antara budaya dan institusi. Nahdlatul Ulama adalah pelembagaan dari aspirasi aspirasi rakyat, kemudian sejak

perang dunia ke 1 (satu) tahun 14 KH. Wahab Hasbullah kembali ke tanah air dan mendirikan Nahdlatul Tujjar (*kebangkitan kaum pedagang*). Serikat ini dijadikan sebagai basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Kalangan pesantren dari sejak awal yang sangat gigih dalam melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional tahun 1908 dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (*kebangkitan tanah air*) pada tahun 1916 di Surabaya yang dipelopori KH. Wahab Hasbullah dan Mas Mansur, yang kemudian Mas Mansur keluar dan aktif di Muhammadiyah. Pada tahun 1918 didirikan Tashwirul Afkar (*konseptualisasi pemikiran*) di kawasan Kebon Dalem Surabaya, sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Pada perkembangan selanjutnya, Nahdlatul Wathan berkembang pesat dan memiliki beberapa cabang, diantaranya adalah, di Surabaya, Gresik, Malang, Banyuwangi, Semarang, hingga di Menes Banten. (Gusdur, pidato 2006:, 5).

Nahdlatul Ulama sepenuhnya menyadari kenyataan tentang kemajemukan (*pluralitas*) masyarakat Indonesia dan meyakini sebagai *sunnatullah*. Pluralitas masyarakat yang menyangkut kemajemukan agama, etnis budaya dan sebagainya, adalah sebuah kenyataan dan rahmat dalam sejarah Islam itu sendiri sejak zaman Rasulullah. Islam memberikan jaminan dan toleransinya dalam memelihara hubungan bersama dengan meletakkan nilai nilai universal seperti keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kehidupan bersama, dengan tidak mengingkari adanya perbedaan dalam hal tertentu. Nahdlatul Ulama menerapkan tiga macam pola

keterpaduan tata hubungan dengan sesama manusia, yaitu:

Tata hubungan antar sesama manusia yang terkait dengan keagamaan atau keislaman, yang lazim disebut dengan “Ukhuwah Islamiyah”. Ini merupakan persaudaraan sesama muslim, yang tumbuh dan berkembang karena persamaan akidah atau keimanan, baik ditingkat nasional maupun internasional. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi seluruh aspek kehidupan, baik aspek ibadah, mu’amalah, munakahat dan mu’asyarah atau hubungan keseharian yang pada akhirnya akan menciptakan dan menumbuhkan persaudaraan yang hakiki. Tata hubungan antar sesama manusia yang terkait dengan ikatan kebangsaan dan kenegaraan, yang lazim disebut “Ukhuwah Wathaniyah”. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal hal yang bersifat mu’amalah, dimana mereka sebagai warga negara memiliki kesamaan derajat, kesamaan tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

Tata hubungan antar manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, yang lazim disebut dengan “Ukhuwah Basyariyah”. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal hal yang berkaitan dengan kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai. Dalam penerapannya, Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian secara seksama dan dengan penuh kearifan. Ia harus dipandang sebagai pola tata hubungan yang saling membutuhkan dan saling mendukung, harus diwujudkan serentak dan tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain. Sikap mempertentangkan antara keduanya akan merugikan, baik bagi kehidupan umat Islam di Indonesia maupun kehidupan

berbangsa. Sikap yang sehat harus diterapkan dalam hubungannya dengan Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah tersebut adalah:

- a) Sikap akomodatif, dalam arti kesediaan menampung berbagai kepentingan, pendapat dan aspirasi dari berbagai pihak.
- b) Sikap selektif, dalam arti adanya sikap cerdas dan kritis untuk memilih kepentingan yang terbaik dan yang aslah atau lebih memberi maslahat serta anfa’ atau lebih memberi manfaat dari beberapa pilihan yang ada.
- c) Sikap integrative, dalam arti kesediaan menyelaraskan, menyasikan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi tersebut secara benar, adil dan proporsional.
- d) Sikap kooperatif, dalam arti kesediaan untuk hidup bersama dan bekerjasama dengan siapapun di dalam kegiatan yang bersifat mu’amalah atau hubungan sesama manusia.

Lebih dari itu, ukhuwah memang tidak hanya memerlukan keseragaman, tetapi juga memerlukan kesediaan untuk “bersatu dalam keanekaragaman”. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ketiga bentuk ukhuwah tersebut hendaknya dilakukan secara proporsional, seimbang dan menurut tuntunan syariat. (Fadeli dan Subhan, 2010: 32).

2. Ciri Ciri Fikrah Nahdliyah Dalam Membentuk Moral Bangsa

Dalam merespon berbagai persoalan, baik yang berkenaan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama memiliki manhaj Ahlusunnah wal Jama’ah yang dijadikan sebagai landasan berpikir Nahdlatul Ulama (*Fikrah Nahdliyah*). Adapun ciri-ciri dari Fikrah Nahdliyah antara lain:

a. Fikrah Tawassuthiyah (Pola Pikir Moderat)

Artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun (seimbang) dan I’tidal (moderat) dalam menyikapi

berbagai persoalan. Sikap moderat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur adalah ketika kasus upaya penutupan lokalisasi dolly di Surabaya. PWNU menugaskan 20 kadernya untuk mendampingi para bekas pekerja seks komersial (PSK) dan warga di lokalisasi Dolly-Jarak, setelah penutupan yang rencananya akan dideklarasikan Pemkot Surabaya Rabu (18/6/2014). Sekretaris PWNU Jatim Akh Muzakki mengatakan, penugasan 20 pendamping dilakukan sebagai bentuk sokongan NU Jatim terhadap upaya pemkot menutup tempat sarang maksiat di Dolly-Jarak. "Ada 20 dai nantinya yang akan NU tugaskan untuk menjadi pendamping," katanya ditemui di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Rabu (18/6/2014).

Fakta jika mayoritas umat Islam di Indonesia khususnya di Jawa Timur adalah pengikut ajaran Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah (aswaja) yang moderat tidak dapat dipungkiri. Keberhasilan itu tidak bisa dilepaskan dari peran Nahdlatul Ulama yang dari awal berdiri meneguhkan diri sebagai pengamal dan pengawal ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Diakui ataupun tidak, inklusifitas ajaran Nahdhatul Ulama yang ditransformasikan dari nilai-nilai aswaja telah memberikan kontribusi besar terciptanya wajah moderat dan fleksible Islam di Indonesia. (Zuhri, 2012: 51).

b. Fikrah Tasamuiyah (Pola Pikir Toleran)

Artinya Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan berbagai pihak lain walaupun aqidah, cara pikirdan budayanya berbeda. Tasamuh berarti toleransi, yang dalam penjabaran selanjutnya dikenal dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah dan ukhuwah Wathaniyah. Tasamuh berkaitan dengan kedewasaan berpikir dan berpendapat serta menghargai pendapat orang lain. Tentang sengketa Islam dan

Kristen, sebenarnya sejak dahulu tidak ada persoalan yang benar benar berasal dari faktor teologis. Kalaupun terjadi konflik bukanlah disebabkan masalah teologi atau masalah keimanan, tetapi terutama karena faktor politik.

PWNU Jawa Timur dalam menyikapi berbagai hal, selalu menampakkan sikapnya yang toleran, misalnya banyaknya aliran yang dewasa ini masuk ke Jawa Timur sebagai basis NU, PWNU tidak melarang aliran tersebut berkembang, akan tetapi pengayoman dan penguatan akidah tetap dilakukan oleh pengurus NU kepada masyarakat, terlebih setelah terjadi konflik di Jember Jawa Timur, dengan adanya organisasi MTA, yang selalu mengusik ajaran atau amaliah warga NU di Jember, begitupula di Sampang Madura, terjadi konflik antara NU dan Syiah, maka dari itu, penanaman akidah terus diberikan oleh pengurus. (Shaleh, 2015: 12).

Namun disisi lain, ditingkat pusat selalu dijaga untuk tetap berada dalam pijakan Fikrah Nahdliyah, namun di sisi lain Nahdlatul Ulama terutama di daerah-daerah, khususnya di Jawa Timur malah seringkali berada di luar lintasan fikrah tersebut. Beragam aktivitas, keputusan dan pemikiran yang dimunculkan oleh Nahdliyin di daerah-daerah cenderung lebih berpihak pada semangat untuk mengusung tema formalisasi syariat Islam. Mereka nampaknya lebih menyukai bahkan lebih merasa nyaman untuk bersetubuh dengan wacana-wacana yang banyak diusung oleh kempok-kelompok Islam ekstrimis apalagi kalau sudah masuk dalam zona amar ma'ruf nahi munkar.

Kenyataan ini sebagaimana pernah diungkap oleh K.H Hasyim Muzadi (*NU Online*, 09/04/2007). Menyatakan bahwa mengembangkan Fikrah Nahdliyah atau

pokok-pokok pemikiran ke-NU-an mengalami banyak kendala. Saat ini Fikrah Nahdliyah sedang berada dalam “kepungan” berbagai macam ideologi dan pemikiran lain. Hal ini disebabkan karena Fikrah Nahdliyah yang menjadi ciri khas pemikiran Nahdlatul Ulama kurang disosialisasikan secara massif baik secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat Nahdliyin, akibatnya banyak yang tidak peduli dan tidak tahu tentang Nahdlatul Ulama, walaupun mereka lahir dan besar di lingkungan NU.

Rupanya, pernyataan ini bukan hanya isapan jempol belaka. Di Madura, misalnya, daerah yang dikenal sebagai salahsatu basis Nahdlatul Ulama, karena mayoritas masyarakatnya merupakan Nahdliyin. Bahkan di Madura, NU telah dijadikan sebagai “agama” oleh sebagian besar masyarakat kalangan bawah yang terkenal sangat fanatik. Fenomena menguatnya semangat untuk lebih menyukai wacana-wacana formalisasi syariat Islam begitu mudah didapatkan, bahkan cenderung merata hampir disebagian Nahdliyin yang tersebar di empat kabupaten di pulau Madura. Fenomena penerapan Perda Syariat Islam di Pamekasan menjadi salahsatu fakta adanya kesenjangan pemahaman Fikrah Nahdliyah antara NU pusat, dengan di daerah. Perda yang lahir atas desakan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) yang dibentuk atas dukungan dari sejumlah Organisasi masyarakat (Ormas) Islam telah menempatkan Nahdlatul Ulama pamekasan sebagai pendukung utama. Kesenjangan dalam memposisikan Fikrah Nahdliyah ini juga terjadi di Kabupaten Sampang, tatkala meletusnya konflik Sunni-Syiah. Pemaknaan adanya *Fikrah Tasamuhhiyyah (pola pikir toleran)* dalam

Fikrah Nahdliyah yang coba dipaparkan oleh PBNU malah kurang memunculkan respon positif dari kiai-kiai NU Sampang baik yang berada distruktural maupun non structural. (Mahatma, 2008: 61).

Fenomena yang serupa juga ditemukan di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep. Walaupun skalanya tidak seekstrim seperti yang terjadi di Pamekasan dan Sampang namun gelagat untuk mengarah pada dukungan penerapan Islam formalistik sangat jelas untuk dibaca. Di Bangkalan, PCNU setempat mengusulkan diterbitkannya Perda agar seluruh peserta didik dan pegawai kantor, wajib menggunakan busana muslim atau berjilbab. Hal tersebut dinilai sangat penting, guna menjaga norma agama dan sekaligus menegaskan identitas kota santri. Usulan tersebut, dituangkan secara langsung oleh jajaran PCNU, dalam hearing dengan DPRD setempat dan organisasi lain, yang membahas masalah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan pendidikan, di ruang DPRD Bangkalan. (Detik, 29 Juli 2009).

Lain lagi dengan gejala yang muncul di Sumenep, Meskipun menuai pro kontra, keinginan DPRD Sumenep untuk menjadikan Sumenep sebagai kawasan bebas buta huruf Al-Qur’an dengan adanya Perda khusus nampak sangat mendapatkan dukungan dari sejumlah aktivis NU. Terbukti Raperda Wajib Baca Tulis Al-Qur’an saat itu begitu mudah masuk dalam program legislasi daerah.

c. *Fikrah Ishlahiyyah (Pola Pikir Reformatif)*

Artinya Nahdlatul Ulama selalu mengupayakan perbaikan menuju kearah yang lebih baik (*al islah ila ma huwa al ashlah*). Di Jawa Timur tradisi adalah hal yang sangat dijaga dan dipelihara dengan

baik, seperti acara tahlilan, selamatan dll. Pada hakikatnya majelis tahlil atau tahlilan adalah hanya nama atau sebutan untuk sebuah acara di dalam berdzikir dan berdoa atau bermunajat bersama, yaitu berkumpulnya sejumlah orang untuk berdoa atau bermunajat kepada Allah SWT dengan cara membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti tahmid, takbir, tahlil, tasbih, Asma'ul husna, shalawat dan lain-lain. Maka sangat jelas bahwa majelis tahlil sama dengan majelis dzikir, hanya istilah atau namanya saja yang berbeda namun hakikatnya sama. Tahlil artinya adalah lafadh *Laa ilaaha illallah*. Mengenai rangkuman tahlilan itu, tak satupun Ulama dan Imam Imam yang memungkirinya. Menghadihkan Fatimah, Yaasiin, dzikir, Tahlil, Shadaqah, atau Qadha puasanya dan lain lain, itu semua sampai kepada Mayyit, dengan Nash yang Jelas dalam (Shahih Muslim hadits no.1149) bahwa “seorang wanita bersedekah untuk Ibunya yang telah wafat dan diperbolehkan oleh Rasul saw”, dan adapula riwayat Shahihain Bukhari dan Muslim bahwa “seorang sahabat menghajikan untuk Ibunya yang telah wafat”, dan Rasulullah SAW pun menghadihkan Sembelihan Beliau SAW saat Idul Adha untuk dirinya dan untuk ummatnya, “Wahai Allah terimalah sembelihan ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari Ummat Muhammad”. (Shahih Muslim hadits no.1967).

Dan hal ini (pengiriman amal untuk mayyit itu sampai kepada mayyit) merupakan kesepakatan (*Jumhur*) Ulama seluruh madzhab dan tak ada yang memungkirinya apalagi mengharamkannya, dan perselisihan pendapat hanya terdapat pada madzhab Imam Syafi'i, bila si pembaca tak mengucapkan lafadz: “Kuhadihkan”, atau

wahai Allah kuhadihkan sedekah ini, atau dzikir ini, atau ayat ini..”, bila hal ini tidak disebutkan maka sebagian Ulama Syafi'iy mengatakan pahalanya tak sampai.

Jadi tak satupun ulama ikhtilaf dalam sampai atau tidaknya pengiriman amal untuk mayyit, tapi berikhtilaf adalah pada Lafadznya. Demikian pula Ibn Taimiyah yang menyebutkan 21 hujjah (dua puluh satu) dalil tentang mendapat manfaat dari amal selainnya (*Intifa' min 'amalilghair*) Mengenai ayat: “*Dan tiadalah bagi seseorang kecuali apa yang diperbuatnya*, maka Ibn Abbas ra menyatakan bahwa ayat ini telah mansukh dengan ayat “*Dan orang orang yang beriman yang diikuti keturunan mereka dengan keimanan*”. (Kholilurrahman, 2007: 56).

Jika aswaja dipahami dengan benar dan menjadi acuan bertindak dalam kehidupan maka akan mampu memfilter pengaruh globalisasi dan masuknya budaya luar yang dapat memicu munculnya sikap adopsi budaya yang negatif seperti tidak toleran terhadap perbedaan, kekerasan, dan berbagai macam bentuk sikap negatif lainnya yang kesemuanya dapat menodai karakter kelompok Islam aswaja yang dikenal memiliki sikap kearifan, moderat, menghargai budaya lokal, menghargai perbedaan serta anti kekerasan.

d. Fikrah Tathawwuriyah (Pola Pikir Dinamis)

Artinya Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Salah satu bentuk implementatif dari kontekstualisasi diberlakukannya Fikrah Nahdliyah ini, adalah Banser yang awalnya bergerak di bidang keamanan, kini di Jawa Timur, mereka menjadi pemandu wisata religi, terwujud pula dalam ketegasan NU

yang menolak upaya pendirian negara Islam dan pemberlakuan formalisasi syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Seperti di Madura Jawa Timur, adapula wacana menerapkan syariat Islam sebagai perda. Hal ini nampak hasil *Majelis Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama* di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo Jawa Timur pada November 2007. Salahsatu point penting adalah pembahasan tentang "Khilafah dan Formalisasi Syari'ah". Forum tersebut memberikan argumentasi bahwa tidak ada dalil (*nash*), Al-Qur'an atau Hadist yang mengharuskan pembakuan bentuk khilafah dalam sistem ketatanegaraan Islam, karena keberadaan khilafah adalah bentuk *ijtihadiah(interpretasi)* belaka. Sedangkan upaya penerapan syariat Islam harus dijalankan secara substantif bukan diformalisasikan dalam bentuk peraturan-peraturan formal. (Suryanegara, 2016: 151).

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan, mempunyai rasa tanggungjawab moral terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Atas dasar inilah, kemudian Nahdlatul Ulama membentuk lembaga yang membahas segala persoalan mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. Forum itu disebut Lajnah Bahtsul Masail (LBM). LBM merupakan lembaga atau forum yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, dalam butir F pasal 16 menyatakan bahwa, "*tugas bahtsul masail adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum*". (Imam Yahya, 2009: 42).

Bahtsul masail di kalangan Nahdlatul Ulama diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan ditengarai forum ini lahir sebelum Nahdlatul Ulama dibentuk. Sebetulnya LBM telah berkembang di tengah masyarakat muslim tradisional pesantren jauh sebelum tahun 1926 dimana NU didirikan. Secara individual mereka bertindak sebagai penafsir hukum bagi muslimin disekelilingnya. Berangkat dari sistem pengambilan keputusan hukum bahtsul masail yang dirumuskan pada Munas Bandar Lampung tahun 1992, sebenarnya telah terjadi dinamika pemikiran hukum di lingkungan NU, baik dari aspek substansi pembahasan, maupun aspek metodologis.

Bagi Nahdlatul Ulama, perumusan sistem ini sangat berarti, bukan saja bagi para kyai yang terlibat langsung dalam arena bahtsul masail, tetapi bagi pengembangan wawasan berpikir masyarakat NU pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, bahtsul masail mengalami masa suram dibawah kepemimpinan KH. Wahab Hasbullah, NU lebih fokus pada political oriented. Dari sinilah ulama dijajaran tanfidziyah maupun syuriah disibukan ke politik praktis. Tahun 1984 visi non-political disepakati, NU keluar dari politik. Pada saat itu, NU konsentrasi pada problem-problem kemasyarakatan dan bahtsul masail mulai giat kembali. Dalam pembahasan bahtsul masail tidak semua berkaitan dengan problem keagamaan. Hal ini dapat diamati dari hasil bahtsul masail tahun 1926-1997 yakni, persoalan kesehatan, politik, ekonomi, sosial masyarakat, advokasi, perkebunan serta keagamaan.

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU, dibuat dalam rangka bermadzhab dengan salahsatu madzhab

empat yang disepakati, serta mengutamakan bermadzhab secara qaul. Oleh karena itu, dalam memberikan jawabankesepakatan hukum (*ittifaq*), digunakan susunan metodologis sebagai berikut: Dalam kasus yang ditemukan jawabannya dalam ibarat kitab dan hanya satu pendapat (*qaul*), maka qaul itu yang diambil. Dalam kasus yang hukumnya terdapat dua pendapat maka dilakukan taqirir jama'i dalam memilih salah satunya. Bila jawaban tidak ditemukan dalam ibarat kitab sama sekali, dipakai ilhaq al masail bin nadhariha secara jamai oleh para ahlinya. Masalah yang dikemukakan jawabannya dalam ibarat kitab dan tidak bisa dilakukan ilhaq, maka dilakukan istimbat jama'i dengan prosedur madzhab secara manhaji oleh para ahlinya.

Rumusan yang dibahas mengenai cara-cara bermadzhab atau mengikuti aliran hukum (*fiqh*) dan akidah (*keyakinan*) tertentu. Aliran fiqh dapat diikuti dengan dua cara;

- 1) Bermadzhab secara qawli, yaitu mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup aliran atau madzhab tertentu.
- 2) Bermadzhab secaramanhaji, yaitu bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. (Imam Yahya, 2009: 45).

e. *Fikrah Manhajiyah* (Pola Pikir Metodologis)

Artinya Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Salah satu Fikrah Manhajiyah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur adalah, dibentuknya Aswaja NU Center, untuk membentengi aqidah masyarakat, dari serangan serangan ormas

yang semakin menggerogoti masyarakat awam yang menjadi sentral utamanya dalam menarik simpati dan menebarkan ajarannya yang radikal. Cikal bakal Aswaja NU Center berawal dari sebuah kajian Islam yang mengfokuskan materi pada bidang keaswajaan. Kajian tersebut dikenal dengan kajian Islam Ahl as-Sunnah wal Jama'ah atau disingkat KISWAH. kajian Islam Ahl as-Sunnah wal Jama'ah (KISWAH) ini di prakarsai oleh para penggede NU di PWNU Jawa Timur, mulai dari Rais Syuriah hingga katib Syuriah dan telah dibahas pada saat rapat harian di PWNU Jawa Timur.

Pada awalnya kajian Islam Ahl as-Sunnah wal Jama'ah (KISWAH) dilaksanakan pada bulan Ramadhan tahun 2010, dan sesuai dengan hasil rapat harian, KISWAH dilaksanakan setiap hari ahad mulai pagi hingga siang hari di bulan Ramadhan, dan yang menjadi pemateri pada saat itu adalah dari dewan Syuriah PWNU Jawa Timur. Setelah bulan Ramadhan berakhir para dewan syuriah sangat menyayangkan jika KISWAH juga ikut berakhir. Selain itu karena dianggap sangat penting di dalam menanggulangi derasnya arus faham lain maka KISWAH harus tetap dilaksanakan. Pelaksanaan KISWAH itu sendiri dilaksanakan setiap sebulan sekali oleh Lajnah, lembaga dan Banom yang bersangkutan.

Setelah berjalan selama kurang lebih satu tahun, tidak hanya KISWAH tetapi terdapat juga program lain seperti TOT dan Buletin yang dilaksanakan. dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, KH. Abdurrahman Nafis Lc. MHI mengusulkan kepada pengurus PWNU agar dibuat suatu wadah dimana didalamnya terdapat perangkat pelaksana program yang berisikan tentang kajian Islam keaswajaan. Sehingga sesuai amanat

Konperwil pada tanggal 31 Januari 2011 bertepatan dengan peringatan Harlah NU ke 85 di PWNU Jawa Timur, dilaksanakan launching perangkat pelaksana program yang berisikan tentang kajian islam keaswajaan yang diberi nama ASWAJA NU CENTER Jawa Timur oleh wakil ketua umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama : Drs H. As'ad Said Ali.

Aswaja NU Center untuk wilayah Jawa Timur direktornya adalah KH. Abdurrahman Nafis, Lc MHI (saat ini menjabat sebagai wakil katib syuriah PWNU Jawa Timur). Aswaja NU Center Jawa Timur mempunyai lima divisi, yakni divisi Kiswah (Kajian Islam ala Ahlu as-sunnah wal Jama'ah), Dakwah (Dauroh Ahlu as-sunnah wal Jama'ah), Makwah (maktabah Ahlu as-sunnah wal Jama'ah), Uswah (usaha sosialisasi Ahlu as-sunnah wal Jama'ah), dan Biswah (Bimbingan Ahlu as-sunnah wal Jama'ah). (AULA, 2014: 25).

Menurut KH. M. Hasyim Asy'ari, Ahlusunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara spesifik, Ahlusunnah wal Jamaah yang berkembang di Jawa adalah mereka yang dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam akidah mengikuti Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali dan Imam Abu al-Hasan al-Syadzili. (Misrawi, 2010: 107). Menurut Muhammad Khalifah al-Tamimy, Ahlusunnah wal Jamaah adalah para sahabat, tabiin, tabiit tabi'in dan siapa saja yang berjalan menurut pendirian Imam-Imam yang memberi petunjuk dan orang-orang yang mengikutinya dari seluruh umat semuanya. (A. Nasir, 2010: 190).

Definisi di atas menegaskan kekayaan intelektual dan peradaban yang dimiliki Ahlusunnah wal Jamaah, karena tidak hanya bergantung kepada Al-Qur'an

dan Hadits, tapi juga mengapresiasi dan mengakomodasi warisan pemikiran dan peradaban dari para sahabat dan orang-orang salih yang sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi. Terpaku dengan Al-Qur'an dan Hadis dengan membiarkan sejarah para sahabat dan orang-orang saleh adalah bentuk kesombongan, karena merekalah generasi yang paling otentik dan orisinal yang lebih mengetahui bagaimana cara memahami, mengamalkan dan menerjemahkan ajaran Rasul dalam perilaku setiap hari, baik secara individu, sosial, maupun kenegaraan. Berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadis, bisa mengakibatkan hilangnya (*esensi*) agama, karena akan terjebak pada aliran dhahiriyah (*tekstualisme*) yang mudah menuduh bid'ah kepada komunitas yang dijamin masuk surga, seperti khalifah empat.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Fikrah Nahdliyah dalam Proses Pembentukan Moral

a. Faktor Penghambatnya adalah :

Dalam kehidupan sehari-hari persaudaraan dapat terganggu kelestariannya, apabila terjadi sikap-sikap perusak (*muhlikat*) yang bertentangan dengan etika sosial yang baik. Oleh sebab itu, agar kelestarian ukhuwah di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur tetap terwujud dan semakin kuat, maka sikap-sikap ini hendaknya dibuang jauh-jauh dari tengah-tengah masyarakat. Sikap-sikap inilah yang masih melekat pada sebagian golongan atau masyarakat Indonesia, antara lain:

1. Assakhriyah (*Menghina*)

Persaudaraan ditengah masyarakat akan sangat terganggu dan akan menjadi rusak, bila diantara anggota masyarakat timbul sikap saling menghina, baik secara pribadi, maupun kelompok. Penghinaan

adalah sumber permusuhan, karena seseorang yang mendapat penghinaan akan timbul sakit hati. Dan apabila rasa sakit hati ini memuncak, maka ia akan melawan dan terjadilah permusuhan.

2. Allamz (*Mencela*)

Sebagaimana sikap assakhriyah, sikap allamz (*mencela*) juga dapat merusak persaudaraan. Kalau sikap assakhriyah lebih dititikberatkan pada memandang rendah seseorang atau kelompok. Sikap ini terjadi bila seseorang atau kelompok terlalu membesar-besarkan kesalahan atau kekurangan orang lain yang seharusnya malah ditutup-tutupi. Dengan demikian, seseorang atau kelompok itu akan melawan, yang akhirnya timbul perselisihan, serta rusaklah persaudaraan.

3. Suudzdzon (*Buruk sangka*)

Buruk sangka adalah perbuatan keji yang diakibatkan oleh hati yang kotor, serta menimbulkan kedengkian terhadap orang yang memiliki kualitas yang lebih dari dirinya, serta tidak ingin ada yang melebihi dari dirinya dari segi apapun, sehingga dia selalu memandang picik orang yang melebihi dirinya.

4. Takabbur (*Sombong*)

Sombong adalah hasil dari perasaan ujub (*berbangga diri*), menganggap dirinya lebih baik dari yang lainnya, menganggap rendah orang lain, sehingga ketika berhadapan dengan orang lain, ia selalu merasa yang paling benar dan paling baik diantara yang lainnya, mempengaruhi orang lain untuk mengikuti yang diinginkannya.

5. Acuh tak acuh

Sikap sendiri sendiri tanpa melibatkan orang lain, apapun dikerjakan sendiri, kurang bersilaturrahim terhadap saudara termasuk tetangga dekat, mereka merasa semua bisa dikerjakan sendiri tanpa

ada campur tangan atau bantuan dari orang lain. (Fadlun, 2014: 20).

6. Politik Praktis

Semula Nahdlatul Ulama teguh dan gigih mengembangkan perjuangan sosialnya sebagai organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyah*). Di tengah perjalanan, NU kemudian memoles dirinya menjadi partai politik tanpa menafikan spirit, nilai dan komitmen serta tanggungjawab sosial keummatannya. Saat bergabung dengan Masyumi, dan sebelum tahun 1952, NU masih tegar dengan garis khittah 1926. Bahkan pada tahun 1952, tepatnya ketika muktamar ke 19 di Palembang, NU keluar dari Masyumi. Satu tahun berikutnya, 1953 NU menegaskan dirinya sebagai partai politik (murni). Dengan menjadi partai politik, NU betul betul terlibat jauh dalam pergulatan dan pergunjungan politik praktis dengan sekian macam problematikanya, selama kurang lebih 20 tahun, bahkan ada yang mensinyalir sejak 1952-1980 an.

Ketika NU serius dalam politik praktis, amanah ta'abbudiyah dan keummatan banyak terbengkalai, bahkan gesekan internal NU semakin jauh dari semangat khittah 1926 dan moralitas keulamaan. Dalam politik praktis, yang abadi bukan kebenaran dan kebajikan, melainkan kepentingan dan kemenangan atas komunitas yang lain. Adapun NU dalam pengertian sebagai jam'iyah diniyah yang panji sumbunya adalah ulama, identik dengan pemegang moralitas kenabian dan panutan sosial keumatan. Ulama dianggap sebagai pewaris para Nabi. Sedangkan manusia termasuk ulama adalah khalifah Allah Swt di muka bumi. Karakter mendasar kekhalifahan adalah membina, menjaga dan selalu berkhidmat kepada umat dalam seluruh urusan duniawi maupun ukhrawi. Tidak mengendalikan toleran terhadap pragmatisme, utopisme dan politisasi kepentingan dengan aneka diplomatiknya.

Benar harus dikatakan benar, salah mesti dinyatakan salah. Tidak adanya pemahaman yang integral terhadap filosofi dan spirit khittah 1926 membuat NU serba sulit dan dilematis, sebab sejak awal berdirinya hinggamenyongsong kemerdekaan Republik Indonesia, NU telah menjadi pegulat politik handal yang kuat dan disegani. (Mahatma, 2015: 121-125).

7. Tayangan Televisi

Ada beberapa dampak negatif, yang ditimbulkan oleh tayangan televisi terhadap kebudayaan bangsa, diantaranya adalah

a). Terkikisnya budaya positif bangsa kita.

Dengan adanya televisi, banyak pengaruh negatif yang mulai masuk dan mungkin dapat menggeser budaya bangsa. Yudhianta menyatakan lambat laun budaya ketimuran berubah menjadi budaya ketengahan dan lama lama menjadi budaya kebaratan (1989 : 73) Di kota kota besar, tidak sedikit ditemukan, budaya budaya barat menyelinap di kalangan remaja. Dengan mudahnya, budaya barat masuk dan mengambil alih peran budaya timur. Misanya saja ajang pencarian jodoh Take Me Out. Acara tersebut menampilkan tayangan yang mencerminkan budaya barat. Contohnya, cara berpakaian para kontestannya yang terlalu berlebihan. Selain itu, cara berbicara para kontestan juga kurang sopan untuk diucapkan. Apalagi untuk ditayangkan di stasiun televisi yang di saksikan oleh khalayak umum. Tidak aneh apabila budaya barat dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor penyebab terkikisnya budaya positif bangsa kita.

b). Tayangan televisi Bisa Melukai dan Merusak Peradaban.

Dengan adanya tayangan televisi yang banyak menyajikan tayangan yang berbaur seksual, adegan-adegan kekerasan, kebencian dan kejahatan, orang tua dan

anak bekerja-sama melakukan kejahatan demi uang, anak-anak melawan dan memaki orang tua, murid-murid melawan guru yang akibatnya guru seperti tidak memiliki harga diri lagi di masyarakat, dan kejahatan moral lainnya memberikan pandangan berbeda kepada pemirsanya. Pada kenyataannya, anak kecil masih berperilaku imitatif atau meniru. Pola pikir yang masih sederhana, membuat mereka cenderung menganggap apa yang ditampilkan televisi sesuai dengan yang sebenarnya. Mereka masih sulit membedakan mana perilaku atau tayangan yang fiktif dan mana yang memang kisah nyata. Mereka juga masih sulit memilah-milah perilaku yang baik sesuai dengan nilai dan norma agama dan kepribadian bangsa.

c). Berubahnya gaya hidup remaja.

Dengan adanya media televisi, para remaja Indonesia tidak sedikit lagi yang mengikuti tren budaya barat. Dari mulai pakaian, gaya hidup, penampilan dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan remaja Indonesia, mau tidak mau harus memenuhi segala sesuatu yang dapat meningkatkan rasa gengsinya.

Faktanya banyak remaja sekarang yang meniru penampilan artis luar negeri. Misalnya dengan mengecat rambutnya, berpakaian terbuka, menghias tubuhnya dengan tato, dan masih banyak yang lainnya.

d). Melahirkan kebudayaan *Neo Globalisme*.

Neo globalisme adalah budaya baru yang tercipta dari hasil perpaduan antara dua budaya atau lebih (Fuad Hassan, 1992: 25). Akhir – akhir ini banyak tayangan televisi Indonesia yang meniru tayangan luar negeri, hal ini menyebabkan munculnya budaya neo globalisme. Dimana suatu daerah mengadopsi budaya dari daerah lain dan terbentuklah kebudayaan baru dari akulturasi kebudayaan yang lama. Sekarang dapat dilihat hampir

tidak ada perbedaan dalam cara berpakaian artis-artis Taiwan, China, Korea, dan Jepang. Ini menunjukkan secara tidak langsung adalah proses penyeragaman budaya dimana penyeragaman itu sendiri merupakan karakteristik dari globalisasi. (Muhamad, 2005: 12). **Faktor Pendukungnya adalah :**

Manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk berkoloni, hal itu dengan jelas menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, sejak awal hingga akhir kehidupan. Dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial, ada satu hal yang sangat esensial dan patut dipahami sepenuhnya oleh setiap manusia, yang tidak lain adalah ukhuwah.

1) Membangun Ukuwah

Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran dan keinsafan, bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat. Dengan bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak ancaman yang membahayakan diri mereka. Persatuan, ikatan batin, saling membantu dan keseia-sekataan merupakan prasyarat dari timbulnya persaudaraan (*ukhuwah*) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis.

Tujuan utama Nahdlatul Ulama adalah mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian martabat manusia. Gerakan keagamaan yang digalang dimaksudkan untuk turut membangun dan mengembangkan masyarakat yang bertakwa, cerdas, terampil berakhlak mulia, tenteram, adil dan sejahtera.

KH. Hasyim Asy'ari mengajarkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam dan ukhuwah Wathaniyah ialah persaudaraan sesama warga negara. Ajaran itu tetap dipegang teguh oleh jam'iyah Nahdlatul Ulama, walaupun belakangan, Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj, membalik susunannya menjadi ukhuwah Wathaniyah terlebih dahulu, kemudian ukhuwah Islamiyah. Dengan alasan, kondisi umat Islam dewasa ini tidak menggembirakan. Dibeberapa negara, umat Islam sangat menderita karena pertikaian. Afghanistan yang penduduknya 100 (seratus) persen Islam dilanda perang saudara, lantas diporak-porandakan Amerika, dan sekarang penuh dengan konflik sektarian. Republik Somalia yang penduduknya juga 100 (seratus) persen Islam, bahkan jadi negara gagal. Bisa dikatakan, tak ada pemerintahan di negara itu, karena semua orang bebas memegang senjata dan memiliki kekuasaan sendiri-sendiri. Itu semua, menurutnya karena tidak ada rasa nasionalisme di kalangan warga negaranya. Tak ada ukhuwah Wathaniyah (*persaudaraan sebangsa dan se tanah air*) di sana.

Atas fakta tersebut, KH. Said Aqil Siradj mengusulkan ukhuwah Wathaniyah didahulukan, kemudian ukhuwah Islamiyah (*persaudaraan sesama muslim*). Jika persaudaraan nasional ini sudah kokoh, sangat mudah untuk membangun persaudaraan sesama umat Islam. Logikanya sederhana. Kata dia, orang ingin membangun masjid, mendirikan pesantren atau madrasah butuh tempat berpijak. Jadi memiliki dan menjunjung tanah air merupakan

kewajiban, karena tanpa tanah air, kewajiban berupa dakwah Islam tidak bisa dijalankan. Pidato disampaikan dalam sambutan pengarahan Pelantikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, di halaman Pondok Pesantren Al-Itqon Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, Ahad (6/10/13.

2) Berjasa, Berkembang dan Mandiri

Inilah tiga kata bersayap yang harus jadi pegangan, pedoman, semboyan dan falsafah hidup anak bangsa untuk meningkatkan daya saing, nilai, atau menyelesaikan permasalahan masyarakat dan bangsa, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. kapanpun dan dimanapun berada, ketiganya harus dilaksanakan secara terpadu dan bersamaan, ketiganya harus terjalin berkelindan seiring dan sejalan tidak boleh dipisahkan.

Harus disadari bahwa dalam hidup ini tidak meninggalkan jasa apapun untuk agama, nusa, bangsa dan sesama makhluk, berarti sungguh menya nyiakan kehidupan dunia ini sebagai tempat menanam. Demikianlah pula, jika dalam hidup ini manusia tidak berkembang, berarti telah mati sebelum ajal datang, begitupula jika dalam menjalankan hidup ini, terutama dalam upaya berjasa dan berkembang. Tidak mampu mandiri, selalu tergantung pada orang orang lain dan situasi sekitar, selalu mengikuti arus tanpa memiliki prinsip hidup, maka mereka tidak memiliki kepribadian, laksana budak budak yang hanya menunggu perintah.

Seorang yang mandiri adalah orang yang memiliki jati diri atau identitas diri yang jelas. Memiliki pendirian falsafah hidup yang kongkrit,

tidak mudah diombang ambingkan oleh situasi atau kondisi apapun yang ada di sekitarnya, selain itu, dia juga memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang sendiri, serta untuk menangkap berbagai fenomena, gejala dan tanda tanda zaman yang terjadi di sekitarnya, mampu menangkap sendiri berbagi hikmah yang terkandung dibalik ilmu, data data dan pengetahuan yang diketahuinya. Dalam melaksanakan falsafah hidup berjasa, berjuang, berkembang dan belajar, benar benar mandiri, menciptakan motivasi yang timbul dari dalam diri (*inner motivation*), suatu motivasi yang biasanya mampu bertahan lama dan tidak mudah luntur.

3) Pelopor Ummat

Salah satu visi besar khittah NU 1926, adalah menjadi pelopor terbaik bagi umat, khususnya masyarakat Jawa Timur yang merupakan basis Nahdlatul Ulama. NU sebagai wadah ulama dengan segala karakternya, memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat urgen dalam membina serta menjaga keharmonisan umat secara sosial budaya, sosial politik dan sosial keagamaan, lebih lebih ketika NU masih diposisikan sebagai kekuatan kultur terbesar bangsa ini.

Tugas kepeloporan dalam falsafah khittah 1926 lebih dikenal dengan istilah prinsip prinsip dasar pembentukan umar terbaik (*mabadi khaira ummah*). Sebagai organisasi sosial keagamaan, eksistensi NU ke depan hanya bergantung pada istiqamahnya menjadi kekuatan kultural di tengah tengah kehidupan umat. Sebab pada dasarnya, umat memiliki nilai dan cara pandang tersendiri terhadap organisasi keagamaan apapun bentuknya. Nalar mereka murni dan alami, selalu menilai sesuatu dengan kacamata moralitas obyektif, kepentingan bersama.

Mabadi khaira ummah adalah strategi memproduksi umat berkarakter, umat yang memiliki kejelasan identitas dan kualitas, baik sebagai manusia NU atau manusia Islam yang selalu mentransformasikan nilai-nilai keagamaan NU. Pembentukan karakter dan identitas ini sangat penting bagi kebesaran NU, artinya, jangan sampai dalam kurun waktu yang cepat tiba-tiba NU hanya bisa mengklaim berakar di Ulama dan pesantren, padahal ideologi dan kultur mereka tidak lagi sejalan dengan khittah 1926. *Mabadi khaira ummah* memiliki butir-butir:

Al Sidqu, Kejujuran. Setiap warga NU harus selalu menegakkan kejujuran dalam setiap ucapan, tindakan dan tata cara pergaulan sosialnya. Ulama maupun elit NU saat berhadapan dengan elit birokrat harus jujur. Kalau kehadiran birokrat dan politisi memang tidak sesuai dengan ajaran, dan semangat moral ke NU-an, sebaiknya ditolak dengan karakter majaz atau ilmu kiasan ala NU.

Al Amanah wal Wafa' bil 'ahdi, setia, komitmen dan menepati janji. Perilaku manusia NU harus senantiasa tegas, tidak plin-plan apalagi memolitisir suatu sikap dan kebenaran secara kultur atau juga struktur. Terlambatnya NU dengan pengelolaan kependidikan dengan pesantren sebagai basis utamanya. Struktural NU harus memikirkan hal ini secara utuh serta tidak parsialistik.

At Ta'awun, sikap tolong-menolong, bekerjasama dan bermitra strategis dalam konteks sosial keumatan. Kalau saja ta'awun NU dimanaj dan ditransformasikan dengan baik, maka kualitas kehidupan beragama dan berbudaya dikalangan umat pada umumnya tidak akan mengalami

penurunan dan kemunduran. Al Adalah, keadilan. Pakar tafsir dari Iran, Sayyid Thabathabai, mensinyalir bahwa keadilan adalah ketakwaan, artinya, siapa diantara umat yang bertakwa maka tak ada jarak sedikitpun baginya untuk tidak berbuat adil dalam segala hal. Ambruknya sendi-sendi penting dalam keumatan dikarenakan banyak pemimpin dan elit umat yang sudah tidak siap berbuat adil dalam makna adil yang sesungguhnya. Keadilan diukur secara nalar kegunaan (*pragmatisme*), keadilan mulai dianggap baik dilakukan kalau menguntungkan diri dan komunitasnya. Kalau keadilan ditegakkan minimal diinternal NU, maka tidak akan banyak konflik yang mewarnai kehidupan elit, kiai dan pesantren-pesantren NU, terutama dalam perspektif kultur politik.

Al Istiqamah, konsistensi moralitas dan nilai gerakan sosial NU. Konsistensi ini mulai tidak jelas juga dalam kehidupan keorganisasian NU, semangat kembali ke khittah 1926 masih mengalami distorsi dan pembelokan. Konsistensi moralitas bukan semata prinsip dasar pembentukan umat sebagaimana tertuang dalam falsafah khittah 1926, lebih jauh dari itu, adalah konsistensi moralitas kenabian yang selalu dipegang teguh oleh seluruh ulama dan kondisi manusia NU dalam kondisi apapun. (Mahatma, 2015: 133-140).

4) Aktualisasi Nilai-Nilai ASWAJA

ASWAJA atau Ahlussunnah wal-Jamaah sebagai paham keagamaan, mempunyai pengalaman tersendiri dalam sejarah Islam. Ia sering dikonotasikan sebagai ajaran (*mazhab*) dalam Islam, yang berkaitan dengan konsep 'aqidah, syari'ah dan tasawuf dengan corak moderat. Salahsatu ciri intrinsik paham ini sebagai identitas ialah keseimbangan

pada dalil naqliyah dan ‘aqliyah. Keseimbangan demikian memungkinkan adanya sikap akomodatif atas perubahan-perubahan yang berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan secara prinsipil dengan nash-nash formal.

Aswaja juga meyakini hidup dan kehidupan manusia sebagai takdir Allah. Takdir dalam arti ukuran-ukuran yang telah ditetapkan, Allah meletakkan hidup dan kehidupan manusia dalam suatu proses. Suatu rentetan keberadaan, suatu urutan kejadian, dan tahapan-tahapan kesempatan yang di berikan-Nya kepada manusia untuk berikhtiar melestarikan dan memberi makna bagi kehidupan masing-masing. Dalam proses tersebut, kehidupan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor dan aspek yang walaupun dapat dibedakan, namun saling kait-mengait. Di sini manusia dituntut untuk mengendalikan dan mengarahkan aspek-aspek tersebut untuk mencapai kelestarian sekaligus menemukan makna hidupnya. (Mahfudh: 42).

Sedang dalam berikhtiar mencapai kelestarian dan makna hidup itu, Islam Aswaja merupakan jalan hidup yang menyeluruh, menyangkut segala aspek kehidupan manusia sebagai makhluk individual maupun sosial dalam berbagai komunitas bermasyarakat dan berbangsa. Aktualisasi Islam Aswaja berarti konsep pendekatan masalah-masalah sosial dan pemecahan legitimasinya secara Islami, yang pada gilirannya Islam Aswaja menjadi sebuah komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan masyarakat, bukan malah menjadi faktor tandingan yang disintegratif terhadap kehidupan.

Dalam konteks pembangunan nasional, perbincangan mengenai aktualisasi Aswaja menjadi relevan,

justru karena arah pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari upaya membangun manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa ia tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah (sandang, pangan, papan) semata, atau (sebaliknya) hanya membangun kepuasan batiniah saja, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya.

Konsekuensi lebih lanjut adalah, nilai-nilai tradisional digeser oleh nilai-nilai baru yang serba ekonomis. Pertimbangan pertama dalam aktivitas manusia, diletakkan pada “untung-rugi” secara materil. Ini nampaknya sudah menjadi norma sosial dalam struktur masyarakat produk pembangunan. Perbenturan dengan nilai-nilai Islami, dengan demikian tidak terhindarkan. Secara berangsur-angsur etos ikhtiar menggeser etos tawakal, mengabaikan keseimbangan antara keduanya.

Dalam konteks ini, Aswaja harus mampu mendorong pengikutnya dan umat pada umumnya agar mampu bergaul dengan sesamanya dan alam sekitarnya untuk saling memanusiawikan. Aswaja juga harus menggugah kesadaran umat terhadap ketidakberdayaan, keterbelakangan serta kelemahan mereka yang merupakan akibat dari suatu keadaan dan peristiwa kemanusiaan yang dibuat atau dibentuk oleh manusia yang sudah barang tentu dapat diatasi oleh manusia pula. Tentu saja, penumbuhan kesadaran tersebut masih dalam konteks melaksanakan ajaran Islam Aswaja, agar mereka tidak kehilangan nilai-nilai Islami. Justru malah potensi ajaran Islam Aswaja dikembangkan secara aplikatif ke dalam proses pengembangan masyarakat. Pada

gilirannya pembangunan manusia seutuhnya akan dapat dicapai melalui ajaran Islam Aswaja yang kontekstual di tengah-tengah keragaman komunitas nasional. Untuk melakukan pembangunan masyarakat sekarang maupun esok, pendekatan yang paling tepat adalah yang langsung mempunyai implikasi dengan kebutuhan dari aspek-aspek kehidupan. Karena dengan demikian masyarakat terutama di pedesaan akan bersikap tanggap secara positif.

Kebutuhan akan rumusan konsep aktualisasi Islam Aswaja, menjadi amat penting adanya. Konsep itu akan menyambung kesenjangan yang terjadi selama ini, antara aspirasi keagamaan Islam dan kenyataan ada. Suatu kesenjangan yang sangat tidak menguntungkan bagi kaum muslimin dalam proses pembangunan masyarakat, yang cenderung maju atas dorongan inspirasi kebutuhan hidup dari dimensi biologis semata.

Merumuskan konsep-konsep yang dimaksud, memang tidak semudah diucapkan. Identifikasi masalah-masalah sosial secara general dan spesifik masih sulit diupayakan, sehingga konsep aktualisasi secara utuh pun tidak mudah diformulasikan. Akan tetapi secara sektoral aktualisasi itu dapat dikonseptualisasikan secara jelas dalam konteks pendekatan masalah yang dilembagakan secara sistematis, terencana dan terarah sesuai dengan strategi yang ingin dicapai. Kemampuan melihat masalah, sekaligus kemampuan menggali ajaran Islam Aswaja yang langsung atau tidak langsung bisa diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan implementatif yang dilembagakan, menjadi penting. Masalah yang sering disinggung oleh berbagai pihak dan

menarik perhatian adalah keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan yang ada pada garis lingkarbalik (*daur*). Rumusan Khittah 26 pasal ke-6 juga menyinggung keprihatinan NU atas manusia yang

Hubungan yang kedua itu terumuskan dalam prinsip mu'amalah yang bila dijabarkan mampu membongkar kelemahan sekaligus memberi solusi bagi paham kapitalisme dan sosialisme. Konsep itu terumuskan dalam prinsip mu'asyarah yang tercermin dalam berbagai dimensi hubungan interaktif dalam struktur sosial yang kemudian dipertegas oleh rumusan Khittah 26 butir empat, tentang sikap kemasyarakatan NU sebagai aktualisasinya. Tentang hubungan ketiga antara manusia dengan alam lingkungannya terumuskan dalam prinsip kebebasan mengkaji, mengelola dan memanfaatkan alam ini untuk kepentingan manusia dengan tata keseimbangan yang lazim, tanpa sikap melampaui batas (*ishraf*) dan tentu saja dengan lingkungan masalah. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan alam itu tentu saja berorientasi pada prinsip mu'asyarah maupun mu'amalah yang menyangkut berbagai bentuk kegiatan perekonomian yang berkembang. Berarti diperlukan konsep mu'amalah secara utuh yang mampu mengadaptasikan perkembangan perekonomian dewasa ini sebagai aktualisasi ajaran Islam Aswaja. (Mahfudh: 42).

- 5) Aktualisasi Khittah 1926 Hampir semua eksponen NU sibuk memasyarakatkan Khittah 26, pada masa antara pasca-Muktamar NU ke-27 sampai dengan Pemilu 1987. Pada tahap sosialisasi hasil muktamar itu kesibukan beragam, terutama berkisar pada pembicaraan

butir-butir yang berkenaan dengan hubungan antara NU dan OPP (organisasi peserta pemilu). Belum adanya kesiapan wawasan politik yang luas di kalangan warga NU, sempat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terhadap makna khittah dan penjabarannya secara utuh. Ini masih ditambah dengan interes-interes pribadi maupun kelompok yang hanya melihat konstelasi politik dari satu sisi sesuai dengan dorongan kepentingan yang telah dirancang strateginya. Akibatnya muncul ketimpangan pandangan dan wawasan politik, tercermin dari berbagai konflik dan benturan reaksi individual maupun kelompok selama proses Pemilu 1987.

Dampak semacam itu sudah sejak semula diperhitungkan dan diantisipasi sebagai suatu yang wajar terjadi pada masa transisi. Setiap transisi menuju perubahan, hampir dipastikan mengandung gejolak. Apalagi bagi NU yang kaya akan politisi. Hal itu tidak mudah diredam begitu saja, tapi hanya dapat dibendung dengan memperkecil atau mempersempit dampak negatif. Masa transisi harus dilalui dengan segala implikasinya. Tanpa melalui masa itu, NU tidak akan mampu menampilkan eksistensi dirinya yang akomodatif dan integratif di tengah-tengah perkembangan masyarakat.

Secara rasional, Khittah 26 yang salahsatu butirnya membebaskan warga NU menyalurkan aspirasi nasbu al-imamah melalui salahsatu partai politik, menunjukkan adanya titikawal (*starting point*) bagi tumbuhnya kesadaran berdemokrasi pancasila secara lugas. Meskipun diakui masih ada kebingungan kecil di kalangan awam yang memang terbiasa mengikuti panutannya, namun Khittah memproses tumbuhnya

kesadaran berpolitik secara struktural maupun kultural. Kemudian akan menyusul pula kesadaran berbangsa dan bernegara secara dinamis dan plural. Pemilu 1987 telah berlalu, mengantarkan bangsa Indonesia ke tingkat lebih maju dan lebih dewasa di bidang politik, sekaligus di bidang keamanan dan ketertiban. NU pasca Muktamar Situbondo berarti telah melalui masa transisi yang paling rumit dan rawan, ini tidak berarti bahwa NU telah selesai secara total menjalani masa transisi, masih perlu waktu cukup panjang untuk mengubah wawasan warga NU kepada orientasi Khittah 26.

Dari aspek politik saja perubahan wawasan itu belum merata, padahal aspek-aspek lain yang dihadapi makin beragam, semuanya memerlukan jawaban dalam bentuk ikhtiar kerja nyata. Bila tidak segera dipikirkan, akan makin sulit mencari alternatif pemecahannya, menurut ukuran waktu, NU pasca Muktamar Situbondo memang sudah setengah periode lebih, sampai saat ini. Suatu waktu yang relatif lama atau panjang, namun sesuai dengan watak masa transisi NU pasca Pemilu masih perlu membenahi diri, bahkan masih diperlukan reorientasi pada Khittah 26 secara tuntas, untuk lebih mengarah pada aplikasi program hasil muktamar Situbondo dalam kenyataan sosial yang berkembang, utamanya warga NU sendiri.

Pendalaman Khittah 26 untuk menumbuhkan kesamaan persepsi dan wawasan yang luas di kalangan warga NU, dengan demikian tidak dapat ditawar lagi, bagaimana NU sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai organisasi keagamaan Islam Aswaja dengan pendekatan mazhab dan sebagai

organisasi yang bukan hanya gerakan murni mahdlah atau sebagai subkultur, perlu dikaji lagi berdasar Khittah 26. Bagaimana pula sikap kemasyarakatan NU dalam berbangsa dan bernegara dipahami dan disosialisasikan sesuai dengan Khittah 26, agar warga NU mempunyai sikap akomodatif dan integratif, yang bermuara pada kemampuan berintegrasi secara nasional. Keberadaan NU di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini, dengan demikian selalu aktual.

NU disemua jajaran, dengan berorientasi pada Khittah 26 harus mampu melihat kenyataan yang berkembang dan melihat jauh ke depan dengan analisis antisipatif. Lebih penting lagi, ia harus mampu mengkonsolidasi diri sebagai organisasi dan mengidentifikasi potensi yang dimiliki, kiranya cukup banyak potensi yang dimiliki NU. Dari sisi kuantitas dengan jumlah warga dan simpatisannya yang begitu banyak dan tersebar hampir disemua sektor kehidupan, merupakan potensi yang tidak kecil. Dari sisi kualitas secara umum, sumber daya manusia profesional sudah mulai banyak tumbuh, tenaga motivator baik dengan keterampilan tabligh, dakwah, maupun dengan wibawa serta pengaruh para ulama dan kiainya, juga merupakan potensi yang tidak asing lagi dan sangat diperlukan. Lembaga pendidikan NU, pesantren, madrasah dan perguruan tinggi begitu sulit dihitung secara konkrit karena banyaknya. Pada bidang ekonomi, dari pengamatan global secara hipotesis bisa dikatakan, persentase warga NU yang ada pada garis ekonomi menengah lebih banyak. Potensi itu justru mudah dikembangkan untuk menunjang

peningkatan taraf hidup masyarakat yang berekonomi lemah.

Sedangkan untuk menghadapi transformasi kultural, NU memiliki daya tangkal yang tangguh menghadapi pengaruh budaya luar, untuk melestarikan budaya nasional dan kepribadian bangsa Indonesia. Potensi dimaksud adalah ajaran dan nilai-nilai Islam Aswaja yang memang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa dan negara, yaitu Pancasila. Untuk mendayakanfaatkan potensi-potensi itu tidak mungkin dilakukan hanya dengan cara sporadis dan alami. Namun diperlukan keterampilan manajerial, pengorganisasian yang bisa memproyeksikan suatu program rintisan yang aktual dan kontekstual bagi kemaslahatan umat dan warga NU. (Mahfudh: 42).

Kemampuan memaksimalkan potensi diri itu disebut dengan istilah "aktualisasi diri". Aktualisasi diri bagi NU berarti "Aktualisasi Khittah 26" secara utuh dan terpadu. Untuk itu diperlukan perencanaan dan pentahapan yang semuanya harus jelas strateginya, tujuannya, metode dan pendekatan masalahnya. Suatu sistematisasi proses interaksi dari serangkaian kegiatan yang mengarah pada aktualisasi diri NU, untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, perlu diupayakan secara kongkrit dan realistis. Sistematisasi itu sekurangnya dimulai dari diskripsi masyarakat desa warga NU secara utuh dari aspek-aspek budaya, pendidikan, ekonomi alam, masalah yang terjadi kini dan esok, sekaligus mengidentifikasi potensi yang ada serta kemungkinan penggalian potensi baru. Baru kemudian merencanakan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang didukung oleh

potensi dimaksud. Penentuan alternatif yang paling mudah dan tepat sasaran akan memperlancar suatu upaya penyelesaian masalah. Namun begitu, akan masih tergantung pada rencana berikutnya, yaitu teknis operasional yang menyangkut metode pendekatan dan tenaga pengelolanya.

Pada 12 Mei 1983 di Hotel Hasta Jakarta, ada 24 (dua puluh empat) orang yang mayoritas terdiri dari tokoh-tokoh muda NU. Mereka membicarakan kemelut yang melanda NU dan bagaimana mengantisipasinya. Meskipun mereka tidak memiliki otoritas apa-apa pada masa itu, namun kesungguhan mereka ternyata mendatangkan hasil. Mula-mula mereka menginventarisasi gagasan-gagasan, kemudian membentuk "tim tujuh untuk pemulihan khittah" yang bertugas merumuskan, mengembangkan dan memperjuangkan gagasan. Rumusannya berjudul "Menatap NU di Masa Depan" yang kemudian "ditawarkan" kepada segenap "kelompok" di dalam NU.

Pendekatan demi pendekatan dilakukan. Hasil pertama ialah keberanian Rais Aam Kiai Haji Ali Ma'sum beserta para ulama sepuh lainnya untuk mengadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Situbondo tepatnya di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah asuhan KH. As'ad Syamsul Arifin tahun 1983. Panitia penyelenggara Munas adalah KH. Abdurrahman Wahid dan kawan-kawan yang sebagian juga tokoh-tokoh Tim Tujuh atau juga dikenal sebagai Majelis 24 (dua puluh empat). Ternyata Munas Alim Ulama NU kali ini benar-benar monumental, memiliki arti sejarah penting bagi NU, bahkan bagi tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ada dua keputusan yang

sangat penting, yaitu; Penjernihan kembali pandangan, sikap NU dan Pancasila, yang dituangkan dalam deklarasinya tentang hubungan Pancasila dengan Islam dan Rancangan Mukaddimah Anggaran Dasar NU. Pemantapan tekad kembali pada khittah NU yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran tentang pemulihan khittah NU 1926. Dengan keputusan-keputusannya, terutama dua keputusan tersebut, Munas Alim Ulama NU 1983 dapat menerobos kemacetan menuju penanggulangan kemelut internal NU, sekaligus mengubah citra organisasi dalam pandangan hampir semua pihak di luar NU, terutama pihak pemerintah. NU yang selama dasawarsa ini "dijauhi", sekarang "didekati" bahkan disanjung-sanjung. Keberhasilan Munas ini berlanjut dengan "rujuk internal" di Sepanjang, Sidoarjo di rumah KH. Hasyim Latif beberapa waktu berselang. Dengan begitu Muktamar ke-27, setahun kemudian dapat diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam kondisi sudah utuh kembali. Ketika itu NU tidak lagi dipandang sebagai kelompok eksklusif yang sulit diajak bekerjasama, tetapi sebagai kelompok yang positif, konstruktif, tidak lagi sebagai kelompok yang "harus ditinggalkan" tetapi menjadi "pihak yang selalu diperlukan". Muktamar ke-27 yang diadakan di tempat yang sama pada 1984 dan dibuka oleh presiden, mendapat perhatian sangat besar dari semua pihak baik dalam maupun luar negeri, serta tidak ketinggalan masyarakat pada umumnya.

Dengan bekal semangat dan tekad kembali kepada khittah 1926 dan dengan modal cikal bakal risalah

Khitthah Nahdliyyah karya KH. Achmad Siddiq yang dikembangkan dengan menatap NU masa depan. Tim Tujuh untuk pemulihan Khitthah, 1983, serta dipadukan dengan makalah “Pemulihan Khitthah NU 1926”. KH. Achmad Siddiq pada Munas Alim Ulama NU, 1983, serta pokok-pokok pikiran tentang pemulihan khitthah NU 1926 kesimpulan Munas, maka Mukhtamar ke-27 Nahdlatul Ulama pada tahun 1984 di Situbondo menetapkan rumusan terakhir “Khitthah Nahdlatul Ulama”. Di samping itu, Mukhtamar juga menerima dan mengesahkan keputusan Munas Alim Ulama pada 1983, termasuk Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila dengan Islam. Inilah perjalanan panjang tentang Khitthah NU. Para pendahulu telah berusaha memberikan alternatif bagi perjalanan NU pada masanya. Sekarang tugas generasi muda NU untuk meneruskan prestasi para ulama terdahulu dengan tetap menjaga kemurnian NU sebagaimana buah jam’iyyah diniyyah ijtimaiyyah seperti harapan pendiri dan para pendahulu.²

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan berkenaan dengan Fikrah Nahdliyyah dalam Membentuk Moral Bangsa di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Fikrah Nahdliyyah atau Ideologi Nahdlatul Ulama sangatlah signifikan dalam membentuk moral Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur yang saat ini sudah mulai kendor identitasnya. Sejak awal sebelum

terbentuknya Nahdlatul Ulama, kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (*Kebangkitan Tanah Air*) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Tashwirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (*Kebangkitan Pemikiran*), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar, (*Pergerakan Kaum Sudagar*) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Tashwirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi, juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

2. Dalam melakukan pembaharuan dan kritik sosial, NU memiliki cara pandang dan metodologi tersendiri yang dikenal dengan Fikrah Nahdliyyah, yaitu suatu landasan berfikir bagi warga NU yang mengacu kepada prinsip moderat (*fikrah tawasuthiyyah*), tolerans (*fikrah tasamuiyyah*), reformasi (*fikrah ishlahiyyah*), dinamis (*fikrah tathawwuriyyah*) dan metodologis (*fikrah manhajiyyah*). Konsepsi ini menjadi ciri khas warga NU dalam mengukur dan menyelesaikan setiap persoalan. Idealnya konsepsi ini ditingkatkan menjadi konsepsi kebangsaan (*fikrah wathaniyyah*), kalau perlu menjadi konsepsi global (*fikrah ‘alamiyyah*). NU berkeyakinan bahwa jika fikrah-fikrah ini dapat diimplementasikan di tanah air, maka tidak tertutup kemungkinan pusat peradaban dunia Islam masa depan akan bergeser ke Indonesia.
3. Faktor Penghambat dan Pendukung Fikrah Nahdliyyah dalam Proses Pembentukan Moral. Faktor Penghambatnya adalah; Dalam kehidupan sehari-hari persaudaraan dapat terganggu kelestariannya, apabila

² Budairy, MS, “Politik NU kembali ke khitthah”, *Tashwirul Afkar*, 27 Oktober 2009, hlm. 42-50

terjadi sikap-sikap perusak (*muhlikat*) yang bertentangan dengan etika sosial yang baik. Oleh sebab itu, agar kelestarian ukhuwah di tengah-tengah masyarakat tetap terwujud dan semakin kuat, maka sikap-sikap ini hendaknya dibuang jauh-jauh dari tengah-tengah masyarakat, kemudian politik praktis dan tayangan televisi. Faktor pendukungnya adalah; Membangun ukhuwah di tengah tengah masyarakat. Berjasa, berkembang dan mandiri. Menjadi umat pelopor. Mengaktualisasi nilai nilai Ahlussunnah wal Jamaah serta Khittah Nahdlatul Ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aziz, S Moh. Saifullah. 2005. *Al Fiqhul Islami*, Surabaya: Terbit Terang.
- Alama, Badrun. 2000. *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. 1.
- Alfas, Fauzan. 2004. *PMII Dalam Simpul Simpul Sejarah Perjuangan*, PB PMII.
- Alfat, Masan. 1994. *Aqidah Akhlak Madrasah Aliyah*. PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Ali Abi al-Hasan ibn Ismail al-Asy'ari. 2006. *al-Ibanah An Ushul al-Diyanah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ali. AS. 2008. *Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati*, Jakarta, LP3ES.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*. (Ed. II; Cet. IX). Jakarta: Rineka Cipta
- Asmani, Jamal Makmur, *Manhaj Pemikiran Aswaja*, dalam Asy'ari, Hasyim. 1971. *Qonun Asasi Nahdlatul Ulama'*. Kudus: Mutiara Kudus.
- Bachtiar, Tiar Anwar. (Kandidat Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia) "Menjernihkan Makna Moderat", dikutip dari <http://docs.yahoo.com/info/terms/>. hari ahad 8 Juni 2014, jam 16.30.
- Budairy, MS. 2009. "Politik NU kembali ke khittah", *Tashwirul Afkar*, 27 Oktober, hlm. 42-50.
- Djauhari, KH. Muhammad Tidjani. 2008. *Pendidikan Untuk Kebangkitan Islam*, Jakarta: TAJ Publishing.
- Fadeli, H Soeleiman & Subhan, Mohammad. 2010. *Antologi NU, Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*. Surabaya: Khalista.
- Fadlun, Muhammad. 2014. *Mejadi Ulama' dan Umara' yang Sukses Dunia Akhirat*. Penerbit Pustaka Media.
- FKI LIM, 2010. *Gerbang Pesantren, Pengantar Memahami Ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah*. Kediri: Litbang Lembaga Ittihadul Muballigin PP. Lirboyo, cet. 2.
- Hadziq, Ishamuddin. 2007. *Irsyadu al Sary*. Jombang: Ma'had Tebuireng.
- Hasanah, Arifatul. 2003. *Renungan Kaum Bersarung untuk Indonesia yang Sedang Berkabung*, Yogyakarta: Qirtas.
- Hasanuddin, Dkk. 1992. *Pendidikan ke-NU-an (ASWAJA)*. Surabaya: CV Al-Ihsan <http://aswajacenterpati.wordpress.com/2012/04/02/manhaj-pemikiran-aswaja/di> akses Selasa, 8 November 2014
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Edisi 2)* Jakarta: Erlangga.
- Jauhari, KH. Moh. Idris. 1999. *Berjasa, Berkembang, Mandiri: Sebuah Falsafah Hidup untuk Para Santri, Al Amien Prenduan*: Mutiara Press.
- Keputusan Musyawarah Nasional Ulama. 2006. *Bahtsul Masail Maudlu'iyah*.
- Khatthab, Mahmud Syait. 1992. *Al Islam wan Nashr*, Penerbit Darul Fikr.
- Madjid, Nurcholis. 2000. *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, cet. 4, hlm. 282-84 . Dalam karyanya Imam Asy'ari, *al-Luma' fi aal-Raddi Ala Ahl al-Ziaghi wa al-Bida'i*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000 M./ 1421 H., cet. 1.

- Mahatma, Masmuni. 2008. *NU 2 Versi; Dari Pergulatan Menuju Kejayaan*, Bandung: Pusaka Publisher.
- Mahfudh, KH MA Sahal. 2004. *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS.
- Mahfudz, KH. Sahal. 2010. *Politik Praktis Mencabik-cabik Sesama Warga NU*. 23 Maret Makassar.
- Majalah AULA. 2014 Oleh PWNu Jawa Timur.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2006. *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana.
- Misrawi, Zuhairi. 2010, *Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*, Jakarta : Kompas, cet. 1.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. XII). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhibbin Zuhri, Achmad. 2010. *Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari Tentang Ahlussunnah wal Jama'ah*. Surabaya: Khalista & Jakarta LTN PBNU
- Mun'im DZ, Abdul. 2007. "Pergumulan Pesantren dengan Kebudayaan" dalam Badrus Sholeh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, Jakarta: LP3ES.
- Muzadi, KH. Hasyim. 2008. "Islam Moderat" dalam Muchit, Haris, dkk, eds, *Sarung dan Demokrasi: Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan*, Surabaya: Khalista dan LTN-NU Jawa Timur.
- Muzadi, Abdul Muchith. 2012. "NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran". Surabaya: Publisher Khalista.
- Nasir, Sahilun A, 2010. *Pemikiran Kalam (Teologi Islam), Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Press, cet. 1.
- Nata, Abuddin. 1996. *Akhlaq Tasawuf*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- PP IPNU. 2000. *Sejarah Perjalanan IPNU 1955-2000*. Jakarta.
- PP Muslimat NU. 1979. *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*, Jakarta.
- Putra, Wahyu. "Mengasah Sikap Kreatif", dalam <http://www..co.cc/2009/09/Mengasah-Sikap-Kreatif.html>, diakses pada hari ahad tanggal 8 Juni 2014 jam 16.30 WIB
- Rahmat, M. Imdadun. 2003. *Islam Pribumi, Islam Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Siroj, KH. Said Aqil. 2012. *Dialog Tasawuf Kiai Said, Akidah, Tasawuf dan Relasi Antarumat Beragama*. Surabaya: Khalista.
- Sitompul, 2010. *NU & Pancasila*, Yogyakarta: LKIS.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet. VI Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sulthan Fatoni, Hilmy Muhammad, 2004. *NU: Identitas Islam Indonesia*. Jakarta: eLSAS.
- Suryanegara, Ahmad Mansyur, 1995. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Syamsuddin, Din. 2000. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran.
- Tim Penyusun Pustaka Azet. 1988. *Istiqra', Leksikan Islam*, Jakarta: Pustaka Azet Perkasa.
- Wahyu-Putra, "Mengasah-Sikap-Kreatif", dikutip dari <http://www..co.cc/2009/09/Mengasah-Sikap-Kreatif.html>, pada hari ahad tanggal 8 Juni 2014 jam 16.30 WIB.
- Wilis, Abdul Hamid, 2004. *Sejarah Kelahiran Barisan Ansor Serbaguna (Banser)*, Semarang: Walisongo Press.
- Yahya, Imam, 2009. *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press.